




RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2012 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, LAKIP ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Proses penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses tersebut dimulai dengan perancangan kinerja, pengumpulan data kinerja dan berakhir dengan penyusunan laporan kinerja.


Selain itu, penyajian informasi dan penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2012 ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan.

Secara keseluruhan, LAKIP ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja dari 8 (delapan) sasaran. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut sebanyak 65 IKU dengan 11 IKU Dominan. Simpulan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas Kinerja Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2012 sebagai berikut:

- 
1. Dengan penilaian secara mandiri (*self assesment*), dapat disimpulkan bahwa kinerja 6 Sasaran Strategis dari 8 Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai lebih dari 100% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sasaran 1: Dari 2 IKU dominan tercapai 103,77%
 - b. Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan tercapai 0,00%
 - c. Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan tercapai 171,43%
 - d. Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan, tercapai 128,57%
 - e. Sasaran 5: Dari 1 IKU dominan tercapai 0,00%
 - f. Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan tercapai 102,07%
 - g. Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan, tercapai 104,46%
 - h. Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan, tercapai 100,00%
 2. Dari sisi capaian IKU secara keseluruhan dapat disimpulkan capaian Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 sebesar 102,17% dengan rincian:

No	Nama Sasaran	Rata-rata Capaian Program (%)
1	Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD	98,76
2	Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%	85,71
3	Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya <i>Good Governance</i> (GG) pada 75% BUMN/BUMD	122,77
4	Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	119,14
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda	87,50
6	Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda	101,04
7	Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%	102,40
8	Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan	100,00
RATA-RATA		102,17

3. Dari sisi output penugasan, realisasi PP dan Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP provinsi Kalimantan Selatan masing-masing sebesar 165,97% dan 203,17%. Selama tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan penugasan sebanyak 717 PP. Realisasi penugasan



tersebut terdiri dari realisasi PKP2T sebanyak 408 PP dan realisasi Non PKP2T sebanyak 309 PP. Realisasi ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebanyak 432 PP (capaian 165,97%). Dari sejumlah 717 PP tersebut, dihasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHA/LHE/LHI) sebanyak 833 laporan atau melampaui target yang ditetapkan sebanyak 410 laporan (capaian 203,17%). Laporan yang telah diterbitkan tersebut, terdiri Laporan intern sebanyak 202 Laporan dan Laporan ekstern sebanyak 631 laporan.

Capaian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp15.531.687.000,00 dengan realisasi bruto sebesar Rp14.731.868.000,00 atau 94,85% serta realisasi netto sebesar Rp14.711.417.050,00 atau 94,72%. Disamping anggaran tersebut, terdapat realisasi yang sumbernya berasal dari Mitra/Pemda sebesar Rp2.416.011.419,00.